

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

**Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis**

Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok – Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Arah Kebijakan dan strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
2. Program pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional guna meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, kesadaran dan kesejahteraan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi dalam mengelola kawasan konservasi perairan nasional.

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Permen KP Nomor Per. 65/MEN/ 2020 J.O. Permen KP Nomor Per. 37/MEN/ 2021 organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang terdiri dari : Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Balai setingkat eselon III, dengan rincian sebagai berikut:

Subbagian Umum ; mempunyai tugas Subbagian Tata Usaha ; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKPN;

Kelompok Jabatan Fungsional ; mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul *General Ledger* Pelaporan (GL-P) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaporan Keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri dari Modul *General Ledger* – Pelaporan (GLP), Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset tetap dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang adalah sebagai berikut:

**Pendapatan
-LRA**

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan
-LO**

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
-------	---	------

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 54,810,447,000. Anggaran terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yakni Rupiah Murni senilai 14,033,447,000, PNBPN TA Berjalan 975,000,000 dan Pinjaman Luar Negeri senilai 39,802,000,000. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilaksanakan 12 kali revisi DIPA dengan detail revisi sebagai berikut:

No.	Revisi ke	Tanggal Pengesahan	DIPA Awal	DIPA Perubahan	Alasan Revisi
1	01	23 Februari 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	Pencantuman blokir Automatic Adjustment (Inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja tahun 2025) dalam Catatan Halaman IVA DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut - BKKPN Kupang
2	02	14 Maret 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3	03	10 April 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Revisi pembukaan blokir PNBPN dan RM
4	04	17 April 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	05	18 Juni 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Revisi pembukaan blokir PNBPN
6	06	15 Jul 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Revisi pembukaan blokir PNBPN
7	07	16 Okt 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating)
8	08	24 Okt 2025	54.810.447.000	54.810.447.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating)
9	09	31 Okt 2025	54.810.447.000	59.857.547.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Penambahan KRO RAL penambahan dana PNBPN
10	10	13 Nov 2025	59.857.547.000	59.857.547.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Revisi KPPN pada KRO RAL dari 140 KPPN PH ke 039 KPPN Kupang
11	11	19 Nov 2025	59.857.547.000	59.385.564.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pengurangan belanja Pegawai (51)
12	12	15 Des 2025	59.385.564.000	59.385.564.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran terakhir DIPA 2025

**Rincian Perubahan DIPA
Tahunan Tahun Anggaran 2025**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	1.750.000.000	1.750.000.000
Jumlah Pendapatan	1.750.000.000	1.750.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	9.064.000.000	8.601.347.000
Belanja Barang	37.691.367.000	29.596.642.000
Belanja Modal	8.055.080.000	21.187.575.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	54.810.447.000	59.385.564.000

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat blokir anggaran senilai Rp. 8.899.860.000 pada pagu belanja barang. Realisasi berdasarkan pagu efektif (diluar blokir) sebesar 49,067,974,131 dari pagu efektif sebesar 50,485,704,000 atau sebesar 97,19%.

Rincian blokir sebagai berikut:

Jenis Akun Belanja	PAGU (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif (Rp)	Sumber Dana
Belanja Pegawai (51)	8.601.347.000,00	-	8.601.347.000,00	RUPIAH MURNI
Belanja Barang (52)	4.960.117.000,00	325.533.000,00	4.634.584.000,00	RUPIAH MURNI
Belanja Modal (53)				RUPIAH MURNI
Belanja Barang (52)	3.215.260.000,00	392.366.000,00	2.822.894.000,00	PNBP
Belanja Modal (53)	2.806.840.000,00	-	2.806.840.000,00	PNBP
Belanja Barang (52)	21.421.265.000,00	8.181.961.000,00	13.239.304.000,00	PLN LAUTRA
Belanja Modal (53)	18.380.735.000,00	-	18.380.735.000,00	PLN LAUTRA
Sub Jumlah	59.385.564.000,00	8.899.860.000,00	50.485.704.000,00	-

Realisasi
Pendapatan Rp
3,853,984,901

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 3,853,984,901** atau mencapai **220,23%** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 1,750,000,000**. Rincian pendapatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1.750.000.000	3.841.685.000	219,52%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5.327.383	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6.392.518	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	580.000	
Jumlah	1.750.000.000	3.853.984.901	220,23%

Realisasi Pendapatan Tahunan Tahun 2025 mengalami penurunan **6,76** persen dibandingkan Tahunan Tahunan TA 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3.853.984.901	4.133.213.817	(6,76)
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya - 425629	3.841.685.000	4.114.560.000	(6,63)
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN luran Badan Usaha dan			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin - 425122	5.327.383	15.212.190	(64,98)
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu - 425911	6.392.518	0	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - 425912	580.000	3.441.627	(83,15)
Jumlah	3.853.984.901	4.133.213.817	(6,76)

- 1. Pendapatan jasa lainnya - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya** (Kode Akun 425629) mengalami penurunan sebesar 6,76 % dibanding Tahunan TA 2024. Nominal pendapatan dominan berasal dari pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta

Sarana yang dibawa, Tanda Masuk Pendidikan dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

Rekapitulasi Capaian Pendapatan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan				Nominal	
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan		TM Penelitian
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	480.000	22.300.000	25.010.000		5.400.000	53.190.000
2	TWP Gili Matra	12.700.000	3.441.700.000	115.000	160.000	3.600.000	3.458.275.000
3	TWP Kapoposang	2.280.000	5.900.000	3.450.000		1.350.000	12.980.000
4	TWP Laut Banda	190.000	2.400.000	4.405.000		100.000	7.095.000
5	TWP Kep. Padaido	270.000	1.700.000	1.025.000			2.995.000
6	SAP Raja Ampat	20.000	23.100.000	14.240.000			37.360.000
7	SAP Waigeo	440.000	142.400.000	126.950.000			269.790.000
8	SAP Aru Tenggara						-
TOTAL		16.380.000	3.639.500.000	175.195.000	160.000	10.450.000	3.841.685.000
		Rp3.831.075.000					
Prosentase Besaran PNBP Per Jenis Pungutan		99,72%					
		0,43%	94,74%	4,56%	0,00%	0,27%	

2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Kode akun 425122) berasal dari hasil penjualan peralatan dan mesin yang dihapuskan melalui mekanisme lelang oleh KPKNL dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penjualan BMN berupa 1 Unit Speed Boat/ Motor Tempel dan 1 Unit Survey Boat senilai total Rp. 5,327,383 dengan NTPN 05DD561QVD2BPFEN NTB 330102952802 tanggal 5 Maret 2025 Risalah Lelang nomor 24/14.03/2025-01 tanggal 4 Maret 2025

3. Pendapatan Lain-Lain:

- 1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425911)** yang berasal dari Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu. Transaksi berasal dari Setoran Pengembalian Belanja Gaji a.n pegawai BKKPN periode September 2024 dengan NTPN 9166C55DFIA2TS4G dan NTB 014131682597 senilai 6.392.518.
- 2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425912)** yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang lalu. Transaksi berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri atas TGR Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran kegiatan Lautra TA 2024-2025 dengan NTPN 41C0D0NA0DK6V8MU dan NTB 087301591274 senilai 580.000.

Realisasi Belanja
Negara. Rp
49,067,974,131

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp 49,067,974,131 atau 82.63 % dari anggaran belanja sebesar Rp 59,385,564,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.601.347.000	8.392.625.704	97,57%
Belanja Barang	29.596.642.000	19.510.553.400	65,92%
Belanja Modal	21.187.575.000	21.175.078.292	99,94%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	59.385.564.000	49.078.257.396	82,64%
Pengembalian		10.283.265	0,00
Jumlah	59.385.564.000	49.067.974.131	82,63%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami **kenaikan sebesar 115,36 persen** dibandingkan dengan periode tahun anggaran 2024. Penjelasan kenaikan realisasi belanja secara umum dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 7,34% dikarenakan terdapat penambahan realisasi pembayaran tunjangan jabatan fungsional tertentu Analisis Pengelolaan Jasa Kelautan yang dibayarkan pada tahun 2025 serta penambahan 2 CPNS 2024 per tanggal 1 Juni 2025 dan penambahan PPPK 2025 per Oktober 2025 sebanyak 23 pegawai. Total pegawai BKKPN Kupang yang pembebanan gaji menggunakan belanja pegawai sebanyak 69 pegawai yang terdiri dari 41 PNS, 2 CPNS dan 26 PPPK.
- Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar 36,21% dikarenakan terdapat penambahan anggaran dan kegiatan pada BKKPN Kupang.
- Belanja Modal mengalami kenaikan 3.148,31% dikarenakan terdapat penambahan anggaran dan kegiatan pada BKKPN Kupang yang bersumber dari PNPB dan Pinjaman Luar Negeri.

Perbandingan Realisasi Belanja
TAHUNAN TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.383.558.939	7.810.022.118	7,34
Belanja Barang	19.509.336.900	14.322.467.219	36,21
Belanja Modal	21.175.078.292	651.880.000	3.148,31
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	49.067.974.131	22.784.369.337	115,36

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat pengembalian belanja senilai Rp. 10,283,265 berupa:

1. Belanja Pegawai senilai Rp. 9,066,765 yang berasal dari pengembalian pembulatan gaji dan tunjangan umum pasca dilakukan pembayaran tunjangan fungsional JFT APJK pada bulan Maret 2025
2. Belanja barang – Belanja Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp. 1.216.500 yang berasal dari Dobel Penginputan SPJ dengan nomor kwitansi 2898 dengan uraian “Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri pertemuan pembahasan Penetapan kuota Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2026 di Bogor selama 1 hari pada tanggal 23 November 2025”

Berikut detail pengembalian belanja:

Akun	Uraian	Nominal	Tanggal SP2D	Bukti
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Desember 2024 untuk 2 Pegawai	16	9 Januari 2025	SP2D Nomor 25039130300015 SPM 003
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji Bulan Oktober-Desember 2024 untuk 3 Pegawai	66	16 Januari 2025	SP2D Nomor 250391303000149 SPM 008
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Fungsional Bulan Oktober 2024 s.d. Bulan Februari 2025 untuk 8 Pegawai	7.401.551	5 Maret 2025	SP2D Nomor 250391303001199 SPM 060
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Maret s/d April 2025 untuk 2 Pegawai	72	5 Mei 2025	SP2D Nomor 250391303002985 SPM 113
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan THR Kenaikan Gaji berkala Bulan Februari 2025 untuk 12 Pegawai	185.000	9 April 2025	SP2D Nomor 250391303002040 SPM 090
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan THR Kenaikan Gaji berkala Bulan Februari 2025 untuk 12 Pegawai	60	9 April 2025	SP2D Nomor 250391303002040 SPM 090
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan THR Tunjangan fungsional Bulan Februari 2025 untuk 8 Pegawai	1.480.000	9 April 2025	SP2D Nomor 250391303002041 SPM 089
524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri pertemuan pembahasan Penetapan kuota Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2026 di Bogor	1.216.500	30 Desember 2025	SP2D No. 259991330464923 SPM 330
		10.283.265		

Belanja Pegawai Rp **B.3 Belanja Pegawai**
8,383,558,939

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 8,383,558,939** dan **Rp 7,810,022,118**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai diperuntukan untuk membayar gaji pegawai BKKPN Kupang sebanyak 69 ASN dengan rincian 41 orang PNS, 2 orang CPNS dan 26 orang PPPK. Realisasi belanja tahunan TA 2025 mengalami **kenaikan 7,34** persen dari TA 2024 dikarenakan terdapat penambahan realisasi pembayaran tunjangan jabatan fungsional tertentu Analisis Pengelolaan Jasa Kelautan yang dibayarkan pada tahun 2025 serta penambahan 2 CPNS 2024 per tanggal 1 Juni 2025 dan penambahan 23 PPPK yang baru dilantik per 1 Oktober 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai

Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.815.380.908	6.943.623.859	-1,85%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	894.891.796	324.441.562	175,83%
Belanja Honorarium		-	0,00%
Belanja Lembur	682.353.000	543.256.000	25,60%
Jumlah Belanja Kotor	8.392.625.704	7.811.321.421	7,44%
Pengembalian Belanja Pegawai	9.066.765	1.299.303	598%
Jumlah Belanja	8.383.558.939	7.810.022.118	7,34%

Terdapat pengembalian belanja pegawai pada akun Belanja pembulatan pegawai sebesar Rp. 214 dan akun Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp.9,066,551 yang terbentuk pasca dilakukan

pembayaran tunjangan fungsional JFT APJK pada bulan Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nominal	Tanggal SP2D	Bukti
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Desember 2024 untuk 2 Pegawai	16	9 Januari 2025	SP2D Nomor 25039130300015 SPM 003
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji Bulan Oktober-Desember 2024 untuk 3 Pegawai	66	16 Januari 2025	SP2D Nomor 250391303000149 SPM 008
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Fungsional Bulan Oktober 2024 s.d. Bulan Februari 2025 untuk 8 Pegawai.	7,401,551	5 Maret 2025	SP2D Nomor 250391303001199 SPM 060
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Maret s/d April 2025 untuk 2 Pegawai	72	5 Mei 2025	SP2D Nomor 250391303002985 SPM 113
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan THR Kenaikan Gaji berkala Bulan Februari 2025 untuk 12 Pegawai	185,000	9 April 2025	SP2D Nomor 250391303002040 SPM 090
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan THR Kenaikan Gaji berkala Bulan Februari 2025 untuk 12 Pegawai	60	9 April 2025	SP2D Nomor 250391303002040 SPM 090
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan THR Tunjangan fungsional Bulan Februari 2025 untuk 8 Pegawai	1,480,000	9 April 2025	SP2D Nomor 250391303002041 SPM 089
		9,066,765		

**Belanja Barang Rp
19,509,336,900**

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 19,509,336,900** dan **Rp 14,322,467,219**. Realisasi Belanja Barang 2025 mengalami kenaikan sebesar 36,21% dikarenakan terdapat penambahan anggaran dan kegiatan pada BKKPN Kupang.

Perbandingan Belanja Barang
Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	1.077.551.910	1.493.297.126	(27,84)
Belanja Barang Non Operasional	2.608.286.115	1.410.662.339	84,90
Belanja Barang Persediaan	89.114.840	144.333.135	(38,26)
Belanja Jasa	7.183.144.625	4.359.049.430	64,79
Belanja Pemeliharaan	715.142.563	718.651.359	(0,49)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	7.837.313.347	5.988.664.948	30,87
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	17.261.440	(100,00)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	199.954.623	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	19.510.553.400	14.331.874.400	36,13
Pengembalian Belanja	(1.216.500)	(9.407.181,00)	(87,07)
Jumlah Belanja	19.509.336.900	14.322.467.219	36,21

Terdapat pengembalian belanja barang berupa belanja perjalanan biasa dengan akun 524111 senilai Rp. 1.216.500 yang berasal dari Dobel Penginputan SPJ dengan nomor kwitansi 2898 dengan uraian “Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri pertemuan pembahasan Penetapan kuota Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan

yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2026 di Bogor selama 1 hari pada tanggal 23 November 2025”

Akun	Uraian	Nominal	Tanggal SP2D	Bukti
524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri pertemuan pembahasan Penetapan kuota Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2026 di Bogor	1.216.500	30 Desember 2025	SP2D No. 259991330464923 SPM 330
		1.216.500		

Belanja Modal Rp
21,175,078,292

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 21,175,078,292** dan **Rp 651,880,000**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal tahunan TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.175.078.292	501.880.000	4.119,15
Belanja Gedung dan Bangunan	0	150.000.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	21.175.078.292	651.880.000	3.148,31
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	21.175.078.292	651.880.000	3.148,31

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah tahunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada 2024 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00** persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama tahunan TA 2024 dan TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0.00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.
21,175,078,292*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahunan TA 2025 adalah sebesar **21,175,078,292**.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	21.175.078.292	501.880.000	4.119,15
Jumlah Belanja Kotor	21.175.078.292	501.880.000	4.119,15
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	21.175.078.292	501.880.000	4.119,15

Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

No.	Uraian	SPM	SP2D	Tanggal	Nilai
1	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Sesuai BAP No. BAP.127/BKKPN.PPK/PL.450/VII/2025 tgl 21-07-2025 Jaminan Uang Muka No 16110325000 522 tgl 21-07-2021	00173T/499352/2025	259991340023124	25/07/2025	114.120.361,00
2	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Sesuai BAP No. BAP.128/BKKPN.PPK/PL.450/VII/2025 tgl 21-07-2025 Jaminan Uang Muka No 161103250005 23 tgl 21-07-2021	00174T/499352/2025	259991340023123	25/07/2025	115.112.613,00
3	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Remote Control Box sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor BAST.129/BKKPN.PPK/PL.450/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.	00177T/499352/2025	259991702016585	31/07/2025	10.045.500,00
4	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan KK pada Satker Pangkep sesuai BAST No. BAST.164/BKKPN.PPK/PL.450/VIII/2025 tgl 20-08-2025, BAP No. BAP.168/BKKPN.PPK/PL.450/VIII/2025 tgl 21-08-2025	00200T/499352/2025	259991340038516	25-AUG-25	513.541.590,00
5	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi pada Satker Raja Ampat sesuai BAST No BAST.165/BKKPN.PPK/PL.450/VIII/2025 tgl 20-08-2025 dan BAP No. BAP.169/BKKPN.PPK/PL.450/VIII/2025 tgl 2	00201T/499352/2025	259991340038515	25-AUG-25	517.950.450,00
6	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Remote Control Box sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor BAST.175/BKKPN.PPK/PL.450/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025.	00207T/499352/2025	259991702026401	29-AUG-25	10.045.500,00
7	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Alat Pemantau Target Konservasi Sesuai BAP No BAP.223/BKKPN.PPK/PL.450/X/2025 tgl 10-10-2025, Jaminan Uang Muka dan PT Asuransi Ramayana Tbk No 16110325000598 tgl 7-10-2025	00255T/499352/2025	259991340069727	16-OCT-25	842.750.370,00
8	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno Air Trawangan sesuai BAP No BAP.305/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2025 tgl 11-11-2025 jam inan UM No 16110325000617 tgl 10-11-202	00292T/499352/2025	259991340093838	20/11/2025	192.839.961,00
9	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu sesuai BAP No BAP.312/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2025 tgl 14-11-2025 jaminan UM Nomor 161103 25000620 tgl 04-11-2025	00293T/499352/2025	259991340093813	20/11/2025	420.387.000,00
10	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Sarana Pendukung Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai BAP No BAP.296/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2025 tgl 10-11-2025 jaminan UM Nomor 16 110325000613 tgl 06-11-2025	00296T/499352/2025	259991340095035	24/11/2025	353.644.444,00
11	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang sesuai BAP No BAP.316/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2025 tgl 17-11-2025 jaminan UM Nomor 1 1614031125001932 tgl 12-11-2025	00299T/499352/2025	259991340097650	27/11/2025	515.210.497,00
12	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno Air Trawangan sesuai BAST No BAST.430/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 02-12-2025 BAP No B AP.438/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 02	00314T/499352/2025	259991340105861	04-DEC-25	449.959.909,00
13	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Paket Pengadaan Smartboard Interactive Ruang Meeting sesuai BAP no. BAP.453/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 3-12-2025 dan Jaminan Uang Muka No.1611032 5000626 tgl 2-12-2025	00332T/499352/2025	259991340112623	11-DEC-25	129.429.000,00
14	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal berupa Pekerjaan Pengadaan Sarana Pemantauan Target Konservasi sesuai BAST Nomor BAST.469/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 4-12-2025 dan BAP No BAP.470/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 4-12-2025	00336T/499352/2025	259991340112622	11-DEC-25	1.951.271.630,00
15	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal berupa Pendukung Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai BAST No. BAST.504/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 8-12-2025 dan BAP No.BAP.505/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 8-12-2025	00339T/499352/2025	259991340114285	12-DEC-25	842.155.554,00
16	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sesuai BAST No.BAST.536/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 10-12-2025 dan BAP No. BAP.537/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 10-12-2025	00342T/499352/2025	259991330502734	16-DEC-25	569.600.000,00
17	Pebayaran Belanja Modal berupa Termin I Pengadaan Peralatan Pengolahan Sampah di KK Gili Matra Sesuai invoice nomor PBT/INV/XII/2025/003 tgl 15 Desember 2025 dan BAP No. BAP BAP/BKKPN.PPK/PL.450/XII/20 25 tgl 16-12-2025	00343T/499352/2025	259991340121962	19-DEC-25	500.000.000,00
18	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Generator Listrik 110 KVA pada Kantor Pusat BKKPN Kupang sesuai BAP No BAP.622/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 17-12-2025 jaminan UM Nomor 11614031225001375 tgl 05-12-2025	00345T/499352/2025	259991311442633	22-DEC-25	570.000.000,00
19	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Fungsional Survei Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jasa Kelautan sesuai BAST No.BAST.624/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 17-12-2025 dan BAP No. BAST.625/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 1	00357T/499352/2025	259991330521703	22-DEC-25	585.288.000,00
20	Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Survei Ekosistem sesuai BAP No BAP.638/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 18-12-2025 jaminan UM Nomor 16110325000644 tgl 17-12-20 25	00358T/499352/2025	259991340124160	23-DEC-25	503.895.900,00
21	Pengadaan Dermaga Apung di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang - RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K3HT6SWD6DDVR3KE975FZAA7 untuk	00360T/499352/2025	259990302020989	24-DEC-25	1.186.866.903,00
22	Pengadaan Generator Listrik 110 kVA pada Kantor Pusat BKKPN Kupang - RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K38NV0QFPEAX3TDBZNVFE1Z	00361T/499352/2025	259990302020993	24-DEC-25	570.000.000,00
23	Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu - RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K9V4TCJK0FBJKAYFY50BCX8	00363T/499352/2025	2599903020223907	24-DEC-25	974.083.000,00
24	Pengadaan Perlengkapan Survei Ekosistem - RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCFYPA1XADSSHK26SFZH2NGV	00364T/499352/2025	259990302023908	24-DEC-25	1.175.757.100,00
25	PAKET PENGADAAN SMARTBOARD INTERACTIVE RUANG MEETING - RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KB9PTATC0EGPJZYV33SE1Q7S	00365T/499352/2025	259990302023906	24-DEC-25	302.001.000,00
26	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pengadaan Paket Peralatan Pengolahan Sampah di KK Gili Matra sesuai dengan BAST No BAST.702/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 22-12-2025 dan BAP No. BAP.703/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 22-12-2025	00366T/499352/2025	259991320880700	29-DEC-25	630.913.406,00
27	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengolahan Sampah di KK Gili MatraMesin Incinerator sesuai BAST No BAST.699/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 22-12-2025 dan BAP No. BAP.700/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 22-12-2025	00367T/499352/2025	259991340127956	29-DEC-25	2.720.000.000,00
28	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pengadaan Sarana Pengolah Data/Immobile sesuai BAST No BAST.705/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 22-12-2025 dan BAP No. BAP.706/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 22-12-2025	00368T/499352/2025	259991320880709	29-DEC-25	803.761.400,00
29	Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pengadaan Pengolah Data GIS Peta Zonasi Kawasan Konservasi sesuai BAST No BAST.725/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 23-12-2025 dan BAP No. BAP.726/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 tgl 23-12-2025	00372T/499352/2025	259991340127955	29-DEC-25	307.600.000,00
30	Pengadaan Kendaraan Fungsional Geral Pelayanan Sini Situ Nomor Kontrak EP-01KA31CBG8FTXFD51HEJZ10VRN (RPATA)	00373T/499352/2025	259990302024251	29-DEC-25	737.115.900,00
31	Pengadaan Sarana Pengolah Data (Mobile) Nomor Kontrak EP-01KCT2Z38Q0QCZ2RA3EF6HSYZD (RPATA)	00374T/499352/2025	259990302026879	29-DEC-25	326.157.300,00
32	Pengadaan Sarana Pengolah Data (Mobile) Nomor Kontrak EP-01KCT2Z38Q0QCZ2RA3EF6HSYZD (RPATA)	00375T/499352/2025	259990302026880	29-DEC-25	761.033.700,00
33	Penggantian Uang Persediaan (GUP) Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Keperluan Belanja Modal pada Kantor BKKPN Kupang - Belanja Peralatan Pendukung Layanan (Elektronik) Kantor BKKPN Kupang Wilker Sabu Rajiua tanggal 16 Desember 2025	00384T/499352/2025	259991702132975	30-DEC-25	19.800.000,00
34	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Pinjaman Luar Negeri untuk Keperluan Belanja Barang pada Kantor BKKPN Kupang	00386T/499352/2025	259991702132973	30-DEC-25	890.331.364,00
35	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Pinjaman Luar Negeri untuk Keperluan Belanja Modal pada Kantor BKKPN Kupang	00387T/499352/2025	259991702136202	31-DEC-25	62.408.940,00
TOTAL					21.175.078.292,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Penyediaan Prasarana Tower Air Bersih	0	150.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	150.000.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	150.000.000	(100,00)

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama TAHUNAN TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TAHUNAN TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TAHUNAN TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TAHUNAN TA 2025 **tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 00,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2025. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama TAHUNAN TA 2025 dan 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp1,279,753,220

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 1,279,753,220** dan **Rp 8,033,900**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp 0

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Bank BNI - BPG 039 BKKPN KUPANG 9891344993521000	0	0
Uang Muka ke Staf Pengelola Anggaran	0	0
Kuitansi UP yang belum dibuat SPP	0	0
Kuitansi TUP yang belum di buat SPM	0	0
Jumlah	0	0

Rekening Bendahara Pengeluaran merupakan Rekening Virtual Pengeluaran dengan persetujuan dari KPPN Kupang Nomor S-2769/WPB.12/KP.03/2020/039 tanggal 21 Oktober 2020 dengan nomor rekening virtual 9891344993521000.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan
Pajak Rp 0

C. 1. 4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp580.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNBPN	0	0
Piutang Lainnya	0	580,000
Jumlah	0	580,000

Nilai Piutang bukan pajak tahun 2024 sebesar Rp.580.000 merupakan Pengembalian Belanja Barang tahun anggaran yang lalu atas TGR belanja Perjalanan dinas dalam negeri pada pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP terhadap Pelaksanaan Kegiatan Lautra 2024.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp0

C. 1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Piutang Jk. Pendek
Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp (2,900)** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

Belanja Dibayar Dimuka
Rp.1,277,429,720

C.1.8 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja = Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing -masing adalah sebesar **Rp.1,277,429,720** dan **Rp0**. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima

seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 adalah berupa pembayaran sewa kantor dan sewa mobil yang masa manfaatnya melebihi tahun anggaran dengan detail berikut:

- 1) Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ambon selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 189.600.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 189.600.000 = \text{Rp } 173.800.000,-$
- 2) Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ternate selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 190.000.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 190.000.000 = \text{Rp } 174.166.667,-$
- 3) Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sorong selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 199.995.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 199.995.000 = \text{Rp } 183.328.750,-$
- 4) Sewa Kantor Pelayanan Wilker Merauke selama 3 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 154.000.000 dari Desember 2025 sd Desember 2028 senilai $35/36 \times \text{Rp } 154.000.000 = \text{Rp } 149.722.222,-$
- 5) Sewa Kantor Pelayanan Wilker Kupang selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 199.995.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 199.995.000 = \text{Rp } 183.328.750,-$
- 6) Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Timor selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 170.000.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 170.000.000 = \text{Rp } 155.833.333,-$
- 7) Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Rote Ndao selama 3 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 264.599.998 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $35/36 \times \text{Rp } 264.599.998 = \text{Rp } 257.249.998,-$

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ambon	173.800.000	0
Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ternate	174.166.667	0
Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sorong	183.328.750	0
Sewa Kantor Pelayanan Wilker Merauke	149.722.222	0
Sewa Kantor Pelayanan Wilker Kupang	183.328.750	0
Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Timor	155.833.333	0
Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Rote Ndao	257.249.998	0
Jumlah	1.277.429.720	0

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp.0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan	0	0
Pendapatan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.
2,323,500

C.1.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 2,323,500** dan **Rp 7,456,800**.

Rincian Persediaan Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	2.323.500	7.456.800
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	2.323.500	7.456.800

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Barang konsumsi senilai total Rp.124,600 berupa:

1. Alat tulis senilai Rp. 2,023,500
2. Meterai senilai Rp. 300,000

Aset Tetap Rp
48,566,879,362

C. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 48,566,879,362** dan **Rp 31,733,765,429**. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp.17,456,684,891

C. 2. 1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 17,456,684,891** dan **Rp 17,456,684,891**.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	17.456.684.891
Mutasi tambah :	
Reklas Masuk	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2025	17.456.684.891
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	17.456.684.891

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	30.192 M2'	Jl Yos Sudarso Bolok-Kec. Alak Kupang, Nusa Tenggara Timur - Kantor Utama BKKPN Kupang	16.907.520.000
2	720 M2	Jl. Ampenan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat - Kantor TWP Gili Matra	512.466.688
3	750 M2	Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur	36.698.203
Jumlah			17.456.684.891

Detail Rincian Tanah:

1. Tanah seluas 30.192 m2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2. Tanah bertempat di Jl. Bangsal Baru, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan luas tanah 720 M2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022. Aset tanah untuk saat ini digunakan sebagai Kantor BKKPN Kupang wilayah kerja Taman Wisata Perairan Gili Matra.
3. Tanah bertempat di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang merupakan tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao nomor 000.2.3.2/1249/BKA.2023 tanggal 28 November 2023 seluas 750 M2.

Peralatan dan
Mesin Rp.
45,938,525,945

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 45,938,525,945** dan **Rp 24,869,581,739**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.869.581.739
Mutasi tambah :	
Pembelian	21.175.078.292
Reklasifikasi Masuk	21.262.500
Perolehan Lainnya	190.215.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	128.214.433
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	199.430.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	- 204.309.072
Reklasifikasi Keluar	- 21.262.500
Koreksi Pencatatan	- 114.120.361
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 305.791.586
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Ekstrakomptabel	227.500
Saldo per 31 Desember 2025	45.938.525.945
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	- 21.843.672.498
Nilai Buku per 31 Desember 2025	24.094.853.447

Gedung dan
Bangunan Rp.
7,812,704,911

C. 2. 3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 7,812,704,911** dan **Rp 7,812,704,911**. Rincian Mutasi

Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	7.812.704.911
Mutasi tambah :	
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	7.812.704.911
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	- 1.080.406.110
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.732.298.801

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.1,467,765,500

C. 2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 1.467.765.500** dan **Rp 1.467.765.500**.

Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.467.765.500
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	1.467.765.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	- 973.810.826
Nilai Buku per 31 Desember 2025	493.954.674

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
RP.1.000.000

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

masing-masing adalah sebesar **Rp 1.000.000** dan **Rp 1.000.000** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,000,000
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 30 Juni 2025	1,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1,000,000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0*

C. 2. 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Rp.
(24,109,801,885)*

C. 2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar **Rp (24,109,801,885)** dan **Rp (19,873,971,612)**.

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2025 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	17.456.684.891	-	17.456.684.891
2	Peralatan dan Mesin	24.869.581.739	(17.819.754.676)	7.049.827.063
3	Gedung dan Bangunan	7.812.704.911	(1.080.406.110)	6.732.298.801
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.467.765.500	(973.810.826)	493.954.674
5	Aset Tetap Lainnya	1.000.000	-	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		51.607.737.041	(19.873.971.612)	31.733.765.429

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Piutang Jangka Panjang Rp.0

C. 3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0

C. 3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Tahunan TA 2025 dan
2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0

C. 3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing - masing debitor adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang TPA Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0

C. 3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.

Panjang TA 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

Aset Lainnya Rp
2,926,169,542

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 2,926,169,542** dan **Rp 1,027,929,844**.

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar ataupun Aset Tetap.

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp 1,954,036,918

C.4.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 1,954,036,918** dan **Rp 0**. Transaksi ini terbentuk dari transaksi pengajuan RPATA penampungan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 masih belum dilakukan pembuatan RPATA Pembayaran.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pekerjaan Reviu Dokumen Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu dengan nomor kontrak SP.428/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 dengan Nomor SPM SP2D RPATA Penampungan 369 259990302024461 tanggal 29 Desember 2025 dan Nomor SPM SP2D RPATA Pembayaran 008 269991302000681 tanggal 2 Januari 2026	602.245.920
2	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pekerjaan Pengadaan Sarana Pengolah Data dengan nomor kontrak EP-01KCTZ238Q0QCZ2RA3EF6HSYZD-AD01 dengan Nomor SPM SP2D RPATA Penampungan 374-259990302026879 senilai 326.157.300 tanggal 29 Desember 2025 dan 375-259990302026880 senilai 761.033.700, serta Nomor SPM SP2D RPATA Pembayaran 006-269991304000470 tanggal 5 Januari 2026 senilai 326.157.300 dan 007-269991304000234 tanggal 2 Januari 2025 senilai 761.033.700	1.087.191.000
3	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Sewa Kendaraan Fungsional Pelayanan Wilker Rote dengan nomor kontrak EP-01KCQXAMWPC6PAAHH4JQZ0NDA7 dengan Nomor SPM SP2D RPATA Penampungan 362 259990302021390 tanggal 24 Desember 2025 dan Nomor SPM SP2D RPATA Pembayaran 010 260390000000137 tanggal 6 Januari 2026	264.599.998
	Jumlah	1.954.036.918

Atas transaksi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya tersebut diatas telah dituntaskan seluruhnya per Januari 2026 dengan dilakukan pembuatan RPATA Pembayaran.

Aset Lain - lain
Rp 10,150,672,300

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 10,150,672,300** dan **Rp 11,086,414,717**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	11.086.414.717
Mutasi tambah :	305.564.086
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	305.564.086
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset tak Berwujud (Software)	-
Mutasi kurang :	1.241.306.503
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	199.430.000
Penghapusan BMN	1.041.876.503
Saldo per 31 Desember 2025	10.150.672.300
Amortisasi s.d 31 Desember 2025	- 9.178.539.676
Nilai Buku per 31 Desember 2025	972.132.624

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp (9,178,539,676)*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp(9,178,539,676)** dan **Rp (10,058,484,873).**

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya Tahunan TA 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah		-	-
B	Aset Lain-lain	11.086.414.717	10.058.484.873	1.027.929.844
	Jumlah	-	-	-
	Total	11.086.414.717	10.058.484.873	1.027.929.844

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban Jangka
Pendek Rp.
1,974,159,685*

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 1,974,159,685** dan **Rp 27,278,318**.

*Uang Muka dari
KPPN Rp. 0*

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
1,974,159,685*

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 1,974,159,685** dan **Rp 27,278,318**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahunan TA 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja langganan Listrik yang masih harus dibayar	10.513.850
2	Belanja langganan Daya dan Jasa Lainnya yang masih harus dibayar	8.482.089
3	Belanja langganan Telepon yang masih harus dibayar	860.216
4	Belanja langganan Air yang masih harus dibayar	266.612
5	RPATA Reviu Dokumen Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu dengan nomor kontrak SP.428/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025	602.245.920
6	RPATA Pengadaan Sarana Pengolah Data dengan nomor kontrak EP- 01KCTZ238Q0QCZ2RA3EF6HSYZD-AD01	1.087.191.000
7	RPATA Sewa Kendaraan Fungsional Pelayanan Wilker Rote dengan nomor kontrak EP- 01KCQXAMWPC6PAAHH4JQZ0NDA7	264.599.998
	Total	1.974.159.685

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C. 5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

C. 5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

*Utang yang belum
ditagihkan Rp. 0*

C. 5.5. Utang yang belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**. Utang yang belum ditagihkan sd 31 Desember 2025 berupa Kwitansi UP yang belum di SPJ kan (Masih dicatat kuitansinya namun belum dibuatkan DRPP dan terbit SP2D). Rincian utang yang belum ditagihkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

*Ekuitas
Rp.
50,798,642,439*

C. 7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 50,798,642,439** dan **Rp 32,742,450,855**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp 3,841,685,000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp 3,841,685,000** dan **Rp 4,114,560,000**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	3841685000	4.114.560.000	(6,63)
Pendapatan Lain - lain	0	0	-
Jumlah	3.841.685.000	4.114.560.000	(6,63)

Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berupa pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2025. Penerimaan paling besar dari Karcis Masuk Pariwisata Alam Perairan (PAP) senilai 3.831.075.000 atau sebesar 99,72% dari keseluruhan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

Rekapitulasi Capaian Pendapatan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	480.000	22.300.000	25.010.000		5.400.000	53.190.000
2	TWP Gili Matra	12.700.000	3.441.700.000	115.000	160.000	3.600.000	3.458.275.000
3	TWP Kapoposang	2.280.000	5.900.000	3.450.000		1.350.000	12.980.000
4	TWP Laut Banda	190.000	2.400.000	4.405.000		100.000	7.095.000
5	TWP Kep. Padaido	270.000	1.700.000	1.025.000			2.995.000
6	SAP Raja Ampat	20.000	23.100.000	14.240.000			37.360.000
7	SAP Waigeo	440.000	142.400.000	126.950.000			269.790.000
8	SAP Aru Tenggara						
TOTAL		16.380.000	3.639.500.000	175.195.000	160.000	10.450.000	3.841.685.000
		Rp3.831.075.000					
Prosentase Besaran PNBP Per Jenis Pungutan		99,72%					
		0,43%	94,74%	4,56%	0,00%	0,27%	

Selisih pendapatan antara Laporan Realisasi Pendapatan dan Pendapatan PNBP pada Laporan Operasional senilai Rp. 12,299,901 merupakan penerimaan yang berasal dari kegiatan non operasional atas pendapatan pelepasan asset senilai Rp. 5,327,383 dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (pengembalian belanja TAYL) senilai 6,972,518 (yang

terdiri dari pengembalian belanja pegawai TAYL senilai 6,392,518 dan pengembalian belanja barang TAYL senilai 580,000).

Uraian	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.853.984.901	3.841.685.000	12.299.901
Penambahan/ Pengurangan Transaksi:			
Pendapatan Pelepasan Aset		5.327.383	
Pengembalian belanja TAYL		6.972.518	
	3.853.984.901	3.853.984.901	-

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp

8,383,558,939

Jumlah Beban Pegawai pada Tahunan Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 8,383,558,939** dan **Rp 7,810,022,118**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Mengalami kenaikan sebesar 7,34% dikarenakan terdapat penambahan jumlah CPNS sebanyak 2 orang dan telah dibayarkan tunjangan fungsional JFT APJK per tahun 2025 serta pengangkatan 23 PPPK per 1 Oktober 2025.

Rincian Beban Pegawai Tahunan Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Gaji	3.784.848.176	3.633.010.188	4,18
Beban Tunjangan - Tunjangan	3.916.357.763	3.633.755.930	7,78
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	682.353.000	543.256.000	25,60
Jumlah Beban	8.383.558.939	7.810.022.118	7,34

Tidak terdapat selisih antara LRA dibandingkan dengan LO pada jenis belanja – beban pegawai.

*Beban
Persediaan Rp
94,248,140*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 94,248,140** dan **Rp 137,680,115**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan Tahunan 2025 mengalami penurunan dibanding dengan 2024 sebesar 16,78% yang disebabkan diantaranya perubahan proporsi besaran anggaran serta efisiensi penggunaan belanja persediaan konsumsi.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	94.248.140	137.680.115	(31,55)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	94.248.140	137.680.115	(31,55)

Selisih persediaan antara LRA dan LO timbul atas transaksi saldo awal persediaan tahun 2025 dan saldo akhir persediaan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Uraian	LRA	LO	Selisih
Persediaan	89.114.840	94.248.140	- 5.133.300
Penambahan/ Pengurangan Transaksi:			
Saldo Awal Persediaan	7.456.800		
Saldo Akhir Persediaan		2.323.500	
	96.571.640	96.571.640	-

*Beban Barang dan
Jasa Rp
9,559,397,379*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 9,559,397,379** dan **Rp 7,263,861,771**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dal

am rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah nilai total LO pada beban barang dan jasa,

**Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahunan TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	925.097.153	1.385.402.252	(33,23)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.174.757	21.278.874	41,81
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	122.280.000	86.616.000	41,17
Beban Bahan	2.608.086.115	1.387.832.539	87,93
Beban Honor Output Kegiatan	0	8.160.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0		0,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0		0,00
Beban Langganan Listrik	102.618.439	187.061.386	(45,14)
Beban Langganan Telepon	9.370.820	14.287.905	(34,41)
Beban Langganan Air	5.483.578	7.594.416	(27,79)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	174.175.319	188.730.399	(7,71)
Belanja Jasa Konsultan	662.245.920	79.694.400	730,98
Beban Sewa	2.918.638.478	2.297.400.000	27,04
Beban Jasa Profesi	175.700.000	124.096.000	41,58
Beban Jasa Lainnya	1.825.526.800	1.462.552.800	24,82
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	0	13.154.800	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Beban	9.559.397.379	7.263.861.771	31,60

Terdapat selisih beban - belanja barang dan jasa antara LRA dengan LO senilai Rp. 1.309.585.271. Nilai tersebut terbentuk atas transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi atas belanja barang yang masih harus dibayar, yakni jurnal balik atas belanja barang yang masih harus dibayar di Januari 2025 yaitu tagihan tagihan pemakaian Listrik, Internet, telepon, air bulan Desember 2024 dan belanja barang yang masih harus dibayar di Januari 2026 atas tagihan pemakaian Listrik, Internet, telepon, air bulan Desember 2025.

2. Transaksi atas belanja sewa dibayar dimuka, yakni belanja sewa tahun 2025 yang pemanfaatannya melewati tahun anggaran.
3. Koreksi akun melalui mekanisme koreksi SPM pada bulan September 2025 dengan nomor 00206A/499352/2025 dan nomor SP2D 259991702026402 tanggal 29 Agustus 2025. Koreksi tersebut terjadi dikarenakan terdapat kesalahan pembebanan Mata Anggaran Keluaran (MAK), sehingga koreksi mengubah kesalahan tersebut dari akun 524113 ke akun 522121 senilai Rp.25.000.000. Dan mengubah akun 522141 ke 521211 senilai Rp.200.000.

Koreksi tersebut menimbulkan nilai lebih kurang antar akun yang bergeser yakni pengurangan di akun 524113 senilai Rp.25.000.000 dan penambahan di akun 522141 senilai Rp.25.000.000. Serta pengurangan di akun 522141 senilai Rp. 200.000 dan penambahan di akun 521211 senilai Rp.200.000.

Selisih beban – belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LRA	LO	Selisih
Barang dan Jasa	10.868.982.650	9.559.397.379	1.309.585.271
Penambahan/ Pengurangan Transaksi:			
Jurnal tagihan listrik dll:			
Jurnal Balik atas Belanja barang yang masih harus dibayar di Januari 2025		27.278.318	
Belanja barang yang masih harus dibayar di Januari 2026	20.122.767		
Jurnal Sewa Kantor, dll:			
Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ambon		173.800.000	
Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ternate		174.166.667	
Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sorong		183.328.750	
Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Merauke		149.722.222	
Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Kupang		183.328.750	
Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Kupang		155.833.333	
Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Rote Ndao		257.249.998	
Koreksi Akun PTUP (SPM Koreksi No. 206 SP2D 259991702026402) dari 524113 ke 522141		25.000.000	
Koreksi Akun (Koreksi SPM):			
Koreksi Akun PTUP (SPM Koreksi No. 206 SP2D 259991702026402) dari 522141 ke 521211		- 200.000	
Koreksi Akun PTUP (SPM Koreksi No. 206 SP2D 259991702026402) dari 522141 ke 521211		200.000	
	10.889.105.417	10.889.105.417	-

Beban

Pemeliharaan Rp

715,142,563

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 715,142,563** dan **Rp 710,759,178**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya

yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan sebesar 0,62% dibanding tahun 2024 dikarenakan adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset – asset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.444.242	196.130.134	(49,30)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	615.698.321	514.629.044	19,64
Jumlah Beban	715.142.563	710.759.178	0,62

Tidak terdapat perbedaan nilai pada belanja – beban pemeliharaan yang tercantum di LRA vs LO.

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp

7,861,676,847

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 7,861,676,847** dan **Rp 6,005,346,388**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Secara keseluruhan terjadi kenaikan beban perjalanan dinas sebesar 30,90% dibanding tahun 2024. Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan penambahan besaran anggaran di tahun 2025 .

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Biasa	5.923.693.146	4.263.121.747	38,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.317.181.988	1.043.956.401	26,17
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	620.801.713	681.586.800	(8,92)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	17.261.440	(100,00)
Jumlah Beban	7.861.676.847	6.005.926.388	30,90

Terdapat selisih nilai antara LRA dengan LO pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 25.580.000. Nilai tersebut terbentuk atas transaksi :

1. Koreksi akun melalui mekanisme koreksi SPM pada bulan September 2025 dengan nomor 00206A/499352/2025 dan nomor SP2D 259991702026402 tanggal 29 Agustus 2025. Koreksi tersebut terjadi dikarenakan terdapat kesalahan pembebanan Mata Anggaran Keluaran (MAK), sehingga koreksi mengubah kesalahan tersebut dari akun 524113 ke akun 522121 senilai Rp.25.000.000. Sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya realisasi akun 524113 senilai Rp.25.000.000 yang bergeser ke akun 522141 senilai 25.000.000.
2. Jurnal balik Pencatatan Piutang atas pengembalian belanja perjalanan dinas (TGR Pemeriksaan Itjen atas Lautra 2024-2025). Jurnal tersebut dicatat pada periode 14 Audited tahun 2024 dan dilakukan jurnal balik dengan nilai Rp. 580,000.

Selisih belan – belanja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LRA	LO	Selisih
Perjalanan Dinas	7.836.096.847	7.861.676.847	-25.580.000
Penambahan/ Pengurangan Transaksi:			
Koreksi Akun PTUP (SPM Koreksi No. 206 SP2D 259991702026402) dari 524113 ke 522141	25.000.000		
Belanja TAYL atas pengembalian TGR Perjadin pada Pemeriksaan Itjen terkait Lautra 2024	580.000		
TOTAL	7.861.676.847	7.861.676.847	-

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 199,954,623**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang

atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahunan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	199.954.623	(100,00)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	199.954.623	(100,00)

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan Tahun 2025 dan Tahun
2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 4,397,761,579

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 4,397,761,579** dan **Rp. 2,859,482,115**. Beban Penyusutan merupakan beban

untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.136.253.282	2.487.992.774	66,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	176.950.618	174.867.285	1,19
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan	34.961.833	57.512.514	(39,21)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintah	49.595.846	139.109.542	(64,35)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	4.397.761.579	2.859.482.115	53,80

Beban Penyisihan D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak

Tertagih Rp

(2,900)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp(2,900) dan Rp.2,900**. Nilai tersebut terbentuk karena Pencatatan Piutang atas pengembalian belanja perjalanan dinas atas nama sesuai dengan Surat Inspektur I KKP No.T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025 tentang Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan Lautran 2024-2025 yang belum dicatat pada periode 13 berdasarkan Hasil Reviu Itjen/rekomendasi Unit E1. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahunan Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	2,900	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah Beban	0	0	0.00

*Kegiatan Non
Operasional
Rp. 202,514,901*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 202,514,901** dan **Rp 0**. Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahunan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5.327.383	15.212.190	(64,98)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	197.187.518	3.441.627	5.629,49
Jumlah Beban	202.514.901	18.653.817	985,65

- 1) Pendapatan pelepasan aset non lancar berasal dari Penjualan BMN berupa 1 Unit Speed Boat/ Motor Tempel dan 1 Unit Survey Boat senilai total Rp. 5,327,383 dengan NTPN 05DD561QVD2BPFEN NTB 330102952802 tanggal 5 Maret 2025 Risalah Lelang nomor 24/14.03/2025-01 tanggal 4 Maret 2025
- 2) Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari :
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425911) yang berasal dari Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu. Transaksi berasal dari Setoran Pengembalian Belanja Gaji pegawai BKKPN periode September 2024 dengan NTPN

9166C55DFIA2TS4G dan NTB 014131682597 senilai 6.392.518.

- 2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425912) yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang lalu. Transaksi berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri atas TGR Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran kegiatan Lutra TA 2024-2025 dengan NTPN 41C0D0NA0DK6V8MU dan NTB 087301591274 senilai 580.000.

3) Pendapatan Perolehan Aset Lainnya senilai Rp. 190,215,000 yang terbentuk pasca Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Video Monitor) melalui modul Aset Tetap atas pengadaan Paket Smartboard Interactive Ruang Meeting pada tanggal 29 Desember 2025. Koreksi dikarenakan terdapat kesalahan pada saat input kuantitas BAST Modul Komitmen yang seharusnya dicatat 2 unit namun tercatat 1 unit. Setelah dilakukan koreksi, terbentuk transaksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (Perolehan Lainnya Video Monitor) dengan nilai yang sama, yakni Rp. 190,215,000.

No.	Uraian	Nominal
1	Pendapatan Pelepasan Aset berupa Penjualan/ Lelang BMN	5.327.383
2	Penerimaan kembali Belanja TAYL - Belanja Pegawai TAYL dan Belanja Barang TAYL	6.972.518
3	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi - koreksi kuantitas aset	190.215.000
TOTAL		202.514.901

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 32,742,450,855

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 32,742,450,855** dan **Rp 34,908,492,523**

Defisit LO
Rp
(26,967,582,646)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp (26,967,582,646)** dan **Rp (20,853,895,391)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp0**.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Nilai Persediaan untuk Tahunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Tahunan TA 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

Selisih Revaluasi

Aset

Rp0

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Koreksi Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp (190,215,000)

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp (190,215,000)** dan **Rp0**.

Koreksi Lain-Lain

Rp0

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar

Entitas

Rp 45,213,989,230

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp. 45,213,989,230** dan **Rp 18,687,853,723**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas Tahunan TA 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.853.984.901)
Ditagikan ke Entitas Lain	49.067.974.131
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	45.213.989.230

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar **Rp(3,853,984,901)** sedangkan DKEL sebesar **Rp 49,067,974,131**.

E. 5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 **Rp0**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp0**.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp 0**.

Ekuitas Akhir

Rp. 50,798,642,439

E. 6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Adalah sebesar **Rp 50,798,642,439** dan **Rp 32,742,450,855,-**

1. LAMPIRAN INFORMASI KEUANGAN

A. LAMPIRAN INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

1) Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN sampai dengan Desember 2025 pada Satker Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional Kupang, Ditjen PKRL, KKP sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Satuan Kerja : Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Program : Program Kualitas Lingkungan Hidup

Lokasi : Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	45.249.100.000	35.861.542.763	79,25%					
2362.PBW.001	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	400.000.000	266.328.213	66,58%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	
2362.RAL001	Sarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan	5.047.100.000	4.971.588.312	98,50%	35	35	Unit	100%	
2362.REA.004	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	39.802.000.000	30.623.626.238	76,94%	4.039.437	4.039.437	Hektar	100%	
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	197.131.124	98,57%					
2365.PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	200.000.000	197.131.124	98,57%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	
2366	Perencanaan Ruang Laut	375.000.000	107.412.520						
2366.PBT.009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	375.000.000	107.412.520	28,64%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.561.464.000	12.910.954.489	95,20%					
2367.EBA.956	Layanan BMN	33.070.000	31.721.964	95,92%	4	4	Layanan	100%	
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.090.000	10.087.520	99,98%	1	1	Layanan	100%	
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	102.950.000	99.958.928						
2367.EBA.962	Layanan Umum	34.457.000	33.283.760	96,60%	1	1	Layanan	100%	
2367.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	20.180.000	17.064.131						
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.815.347.000	12.222.281.524	95,37%	2	2	Layanan	100%	
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	90.810.000	87.762.582	96,64%	47	47	orang	100%	
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	70.000.000	63.267.334	90,38%	1	1	Dokumen	100%	
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	320.720.000	284.875.301	88,82%	2	2	Dokumen	100%	
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	63.840.000	60.651.445	95,01%	4	4	Dokumen	100%	
	TOTAL	59.385.564.000	49.077.040.896	82,64%					

2) Program Prioritas Nasional pada BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada satker BKKPN Kupang Ditjen PKRL - Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) 02–**Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.**

Pelaksanaannya difokuskan pada sektor Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.

PN 2 memiliki 2 (dua) program prioritas, 3 (tiga) kegiatan prioritas, 2 (dua) proyek prioritas, dan 3 (tiga) rincian output yang tersebar di 1 (satu) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp. 5.647.100.000 dan realisasi sebesar Rp 5.435.047.649 (diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait) dengan rincian sebagaimana terlampir berikut:

Nama Satker	Program/ Kegiatan Prioritas	KRO/RO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategi	Target	Capaian Output Strategis
02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru								
BKKPN Kupang	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan/ 001 - Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	400.000.000	266.328.213	66,58%	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1	1 Rekomendasi Kebijakan
	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan/ 001 - Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	5.047.100.000	4.971.588.312	98,50%	Unit	35	35 Unit
	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan/ 001 - Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Tertuar	200.000.000	197.131.124	98,57%	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1	1 Rekomendasi Kebijakan
TOTAL			5.647.100.000	5.435.047.649	96,24%			

**Data Capaian Output strategis berdasarkan capaian output Satker BKKPN Kupang bulan Desember 2025 yang sudah terkonfirmasi di OMSPAN.*

3) Kegiatan yang bersumber dari pendanaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) TA 2025

1. Program Oceans for Prosperity Project – LAUTRA

2. Capaian Target dan Kendala yang dihadapi, di Tahun anggaran 2025 BKKPN Kupang mengelola anggaran kegiatan Lautra sebesar Rp. 39,802,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30,623,626,238 atau sebesar 76,94. Target pada kegiatan ini berupa capaian terkelolanya Kawasan konservasi Nasional yang dikelola oleh BKKPN Kupang seluas 4.039.436 hektar. Kendala pada pelaksanaan kegiatan diantaranya:

- Terdapat blokir anggaran pasca penerapan Inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja tahun 2025 sebesar Rp. 8,181,961,000.
- Terdapat penyesuaian rencana kegiatan pasca penundaan pekerjaan *Ocean Monitoring System* (OMS) di tahun 2025.

No.	Program/Kegiatan/Output		Pagu	Realisasi	%
1	FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup			
		2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		
			2362.REA	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	
			051.A	Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera	
TOTAL				39,802,000,000	30,623,626,238 76.94

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan KEP.40/MEN/KU.611/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Keputusan Menteri KP Nomor B.38/BKKPN/KP.440/I/2025, B.39/BKKPN/KP.440/I/2025 dan B.69/BKKPN/KP.440/I/2025 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Imam Fauzi, S.S, M.Eng

Pejabat Pembuat Komitmen : Imam Fauzi, S.S, M.Eng

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar : Ika Rakhmad Satria, S.E

Bendahara Pengeluaran : Andri Kurniawan, S.Pi

Bendahara Penerimaan : Amos Moi Ponggalo, S.Pi

- 2) BKKPN Kupang menyelenggarakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang mempunyai tujuan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Pengendalian dilakukan dengan menetapkan 3 akun signifikan yang merupakan akun beresiko atau berpotensi tinggi salah saji dalam pelaporan keuangan sesuai dengan Surat BKKPN nomor B.636/BKKPN/KP.210/IV/2025 tanggal 22 April 2024 Pengajuan Usulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BKKPN Tahun 2025.

KODE/NAMA AKUN SIGNIFIKAN 2024 sebagai berikut:

- 1) 111611 - Kas di Bendahara Pengeluaran
- 2) 425629 - Pendapatan jasa kelautan dan Perikanan lainnya
- 3) 132111 - Peralatan dan Mesin

Berdasarkan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada November 2025, disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang adalah efektif dan berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

- 3) Pada tahun 2025 terdapat 18 transaksi yang dilakukan jurnal penyesuaian, yakni sebagai berikut:
 1. Jurnal balik Belanja Langganan Listrik yang masih harus dibayar tanggal 8 Januari 2025

2. Jurnal balik Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya yang masih harus dibayar tanggal 10 Januari 2025
3. Jurnal balik Belanja Langganan Telepon yang masih harus dibayar tanggal 9 Januari 2025
4. Jurnal balik Belanja langganan air yang masih harus dibayar tanggal 8 Januari 2025
5. Jurnal Belanja langganan Listrik bulan Desember 2025 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2026 tanggal 31 Desember 2025
6. Jurnal Belanja langganan Daya dan Jasa Lainnya (Internet) bulan Desember 2025 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2026
7. Jurnal Belanja Telepon Desember 2025 yang masih harus dibayar di Januari 2026
8. Jurnal Belanja langganan Air Desember 2025 yang masih harus dibayar di Januari 2026
9. Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ambon selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 189.600.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 189.600.000 = \text{Rp } 173.800.000,-$
10. Jurnal Sewa Kantor Pelayanan Wilker Ternate selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 190.000.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 190.000.000 = \text{Rp } 174.166.667,-$
11. Jurnal Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sorong selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 199.995.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 199.995.000 = \text{Rp } 183.328.750,-$
12. Sewa Kantor Pelayanan Wilker Merauke selama 3 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 154.000.000 dari Desember 2025 sd Desember 2028 senilai $35/36 \times \text{Rp } 154.000.000 = \text{Rp } 149.722.222,-$
13. Sewa Kantor Pelayanan Wilker Kupang selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 199.995.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 199.995.000 = \text{Rp } 183.328.750,-$
14. Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Timor selama 1 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 170.000.000 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 170.000.000 = \text{Rp } 155.833.333,-$
15. Sewa Kendaraan Fungsional Wilker Rote Ndao selama 3 tahun Pada Satker BKKPN Kupang dengan Nilai Kontrak Rp 264.599.998 dari Desember 2025 sd Desember 2026 senilai $35/36 \times \text{Rp } 264.599.998 = \text{Rp } 257.249.998,-$

16. Jurnal (RPATA) Reviu Dokumen Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu dengan nomor kontrak SP.428/BKKPN.PPK/PL.450/XII/2025 dengan Nomor SPM SP2D RPATA Penampungan 369 259990302024461 tanggal 29 Desember 2025
 17. Jurnal RPATA Pengadaan Sarana Pengolah Data dengan nomor kontrak EP-01KCTZ238Q0QCZ2RA3EF6HSYZD-AD01 dengan Nomor SPM SP2D RPATA Penampungan 374-259990302026879 senilai 326.157.300 tanggal 29 Desember 2025 dan 375-259990302026880 senilai 761.033.700
 18. Jurnal RPATA Sewa Kendaraan Fungsional Pelayanan Wilker Rote dengan nomor kontrak EP-01KCQXAMWPC6PAAHH4JQZ0NDA7 dengan Nomor SPM SP2D RPATA Penampungan 362 259990302021390 tanggal 24 Desember 2025.
- 4) Pada tahun 2025 terdapat beberapa pembayaran belanja LS Kontraktual yang menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sebanyak 9 pekerjaan senilai 9.038.782.220,00 dengan detail berikut:
4. Reviu Dokumen Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu senilai Rp. 602,245,920;
 5. Pengadaan Perlengkapan Survei Ekosistem senilai Rp.1,679,653,000;
 6. Pengadaan Mesin Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu senilai Rp.1,394,470,000;
 7. Pengadaan Dermaga Apung di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang senilai Rp.1,702,077,400;
 8. Pengadaan Generator Listrik 100 Kva pada Kantor Pusat BKKPN Kupang senilai Rp.1,140,000,000;
 9. Pengadaan Smarftboard Interactive Ruang Meeting senilai Rp.431,430,000;
 10. Pengadaan Sarana Pengolah Data senilai Rp.1,087,191,000;
 11. Pengadaan Kendaraan Fungsional Gerai Pelayanan Sini Situ senilai Rp.737,115,900;
 12. Sewa Kendaraan Fungsional Pelayanan Wilker Rote senilai Rp.264,599,000.
- Atas keseluruhan pekerjaan diatas tersebut telah seluruhnya dituntaskan sampai dengan 31 Desember 2025 dan telah seluruhnya dilakukan pembayaran RPATA pembayarannya.
- 5) Atas pembayaran RPATA tersebut, terdapat 3 pekerjaan yang dilakukan RPATA pembayaran di bulan Januari 2026 sebanyak 3 pekerjaan dengan nilai Rp. 1,954,036,918. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 muncul akun utang yang belum ditagihkan yang berasal dari Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga atas

RPATA penampungan yang belum dilakukan RPATA pembayaran sebesar Rp. 1,954,036,918. Atas hal tersebut dilakukan reklasifikasi menjadi akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya.

1. Reviu Dokumen Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu senilai Rp. 602,245,920;
2. Pengadaan Sarana Pengolah Data senilai Rp.1,087,191,000;
3. Sewa Kendaraan Fungsional Pelayanan Wilker Rote senilai Rp.264,599,000.